

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian di Indonesia mencakup beragam kegiatan seperti bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Sekitar 50 persen penduduk Indonesia menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian, menjadikannya aspek yang sangat krusial dalam pembangunan negara. Pertanian di Indonesia tidak hanya terbatas pada budidaya tanaman pangan, tetapi juga melibatkan pengelolaan tanaman dan pemeliharaan hewan ternak seperti ayam, bebek, dan angsa, yang membantu para petani dalam menjalankan kegiatan pertanian (Bukhori, 2014).

Sektor pertanian memainkan peran utama dalam ekonomi negara-negara berkembang, memastikan pasokan bahan makanan dan bahan mentah yang penting. Tekanan demografis dan peningkatan pendapatan penduduk membuat kebutuhan akan hasil pertanian semakin meningkat. Selain menyediakan kebutuhan bahan pangan, pertanian juga harus memastikan ketersediaan faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor lain, terutama industri. Ini termasuk penyediaan modal, tenaga kerja, dan bahan mentah yang menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi. Dengan dampak signifikan pada proses pembangunan, sektor pertanian memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selain itu, sektor pertanian juga berperan sebagai sumber utama pemasukan dan pekerjaan bagi penduduk di daerah pedesaan. (Totok Mardikanto, 2007:3; Pratomo, 2010).

Peran ketahanan pangan sangat penting, terutama dalam konteks pencapaian pembangunan optimal suatu negara. Negara-negara maju telah sukses mencapai ketahanan pangan, dan Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, perlu menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas untuk kesejahteraan bangsa. Langkah-langkah menuju

ketahanan pangan nasional perlu didasarkan pada pemanfaatan sumber daya pangan lokal yang beragam antar daerah dan menghindari ketergantungan pada impor pangan. Distribusi pangan yang merata dan akses langsung ke pangan menjadi kunci utama untuk mencapai ketahanan pangan (Pratomo, 2010).

Tantangan besar yang kita hadapi untuk memastikan kita punya cukup makanan di negara kita adalah karena jumlah orang yang butuh makan terus bertambah, sementara produksi makanan tidak bisa mengikuti pertumbuhan ini. Pertambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi, tingkat daya beli masyarakat, dan perubahan selera makanan semuanya ikut berkontribusi pada meningkatnya kebutuhan pangan. Sayangnya, lahan yang bisa digunakan untuk bercocok tanam dan kualitas sumber daya alam kita semakin terbatas.

Dampak dari masalah ketahanan pangan ini merembet ke berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, hubungan sosial, kehidupan budaya, politik, dan keamanan di Indonesia. Membangun ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita semua. Kita perlu berperan aktif mulai dari tingkat daerah, daerah, bahkan di tingkat rumah tangga, sesuai dengan aturan yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1996 tentang pangan. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan perubahan dalam penggunaan lahan, di mana area yang tadinya digunakan untuk pertanian beralih fungsi menjadi non-pertanian. Proses ini sering dipicu oleh pertumbuhan infrastruktur, kebutuhan lahan untuk industri, dan pertumbuhan pemukiman. Meskipun hal ini mungkin tak terhindarkan dalam proses pembangunan, perubahan fungsi lahan ini berpotensi mengurangi ketersediaan makanan di tingkat nasional. Oleh karena itu, kita perlu bijaksana dalam mengelola perubahan penggunaan lahan agar kita bisa menjaga ketahanan pangan kita (Irawan, 2005).

Irawan (2005) mengangkat isu dua hal penting dalam perubahan fungsi lahan. Pertama, pembangunan kawasan hunian dan industri bisa membuat akses lebih mudah dan mendorong investor untuk berinvestasi. Yang kedua, naiknya harga lahan mendorong petani untuk menjual lahan mereka kepada investor. Akibatnya, secara keseluruhan, ketersediaan pangan di tingkat nasional menurun,

sementara di tingkat individu, peran petani berubah dari penyedia makanan keluarga sendiri menjadi lebih bergantung pada membeli beras.

Afandi (2011) menyoroti bahwa ketika lahan sawah diubah fungsinya, petani kehilangan pekerjaan dan pendapatan dari pertanian. Ini juga berdampak pada lapangan kerja di sektor pertanian dan bisa menyebabkan kerugian ekonomi, seperti kehilangan sarana pertanian, peralatan pertanian, penggilingan padi, dan persewaan traktor. Menurut Irawan (2005), alih fungsi lahan dapat menghilangkan sumber pendapatan bagi petani, termasuk pemilik, penyewa, penggarap, dan buruh tani, sehingga dapat mengurangi peluang pekerjaan, pendapatan, kemampuan membeli, dan akses ekonomi keluarga petani terhadap pangan.

Santosa dkk. (2011) menunjukkan bahwa perubahan fungsi lahan sulit dihentikan dan cenderung meningkat, berdampak besar pada ketahanan pangan. Proses perubahan ini, yang dikenal sebagai alih fungsi lahan atau konversi lahan, melibatkan masyarakat, pemerintah, dan perusahaan swasta. Meskipun perubahan ini sesuai dengan kepentingan individu dan lembaga, risiko terjadi pembangunan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB) yang dapat merusak lingkungan tanpa kendali juga perlu diperhatikan.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, perubahan fungsi lahan menjadi isu yang timbul, terutama dalam peralihan dari lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian. Peningkatan jumlah penduduk, terutama dari sektor pendidikan, pariwisata, dan kebudayaan, menjadi alasan utama banyak orang pindah ke Kota Yogyakarta. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sejak tahun 2014-2015, lebih banyak orang yang datang ke Kota Yogyakarta daripada yang pindah keluar, dengan pertumbuhan migrasi masuk mencapai 34,61% selama 2012-2016, sementara migrasi keluar hanya 10,27%. Pada tahun 2020, persentase orang yang pindah ke Kota Yogyakarta bahkan meningkat menjadi 4,1%. Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengalami peningkatan seiring dengan pembangunan berbagai fasilitas seperti rumah makan, kos, tempat belanja, dan hotel.

Sarwono (2011:1-2) menekankan betapa pentingnya perencanaan tata guna lahan mengingat keterbatasan lahan dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana dapat menimbulkan konflik dalam penggunaan lahan dan berpotensi merusak, seperti eksploitasi lahan hutan. Agar fungsi lahan tetap berkelanjutan, diperlukan rencana pengelolaan lahan yang sesuai dengan kapasitasnya, yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan didefinisikan secara lebih rinci dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK).

Alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Bantul menimbulkan perubahan pada produktivitas tanaman pangan, ada yang berkurang ada pula justru yang bertambah. Terdapat beberapa komoditas tanaman pangan di kabupaten Bantul seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar. Berikut ini adalah table luas tanam pangan dari tahun 2013-2022 di Kapanewon Pajangan :

Tabel 1. Luas Tanaman Pangan Kapanewon Pajangan

Tahun	Kapanewon Pajangan							
	Luas Panen (ha)				Naik Turun			
	Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar
2013	357	653	10	0				
2014	353	648	8	0	-4	-5	-2	0
2015	350	648	8	0	-3	0	0	0
2016	350	640	8	0	0	-8	0	0
2017	341	634	8	0	-9	-6	0	0
2018	335	631	7	0	-6	-3	-1	0
2019	332	626	10	0	-3	-5	3	0
2020	320	614	7	0	-2	-12	-3	0
2021	311	609	10	0	-9	-5	3	0
2022	301	604	9	0	-10	-3	-1	0

Sumber: Badan Penyuluhan Pertanian Kapanewon Pajangan

Berdasarkan Tabel di atas Pada tahun 2013 padi sawah memiliki luas panen 435 ha, dan pada tahun 2014 Jumlah ya tetap sama, selanjutnya pada tahun 2015 berkurang menjadi 370 ha, kemudian di tahun 2016 luas lahan panen masih sama, di tahun 2017 berkurang drastis dan hanya di angka 359 Ha, Kembali berkurang pada tahun 2018 menjadi 321 ha dan mengalami peningkatan di tahun 2019 di angka 350 ha pada tahun selanjutnya turun Kembali 300 Ha di tahun 2020, pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi di angkat 323 ha dan terakhir di tahun 2022 turun menjadi 287 ha. Luas panen jagung pada 2013 sampai 2014 diangka 18 Ha, pada tahun selanjutnya 2015 meningkat menjadi 24 ha kemudian meingkat lagi di tahun 2016 diangka 63 ha dan pada 2017 meingkat drastis 71 ha, di tahun berikutnya Kembali mengalami penurunan menjadi 66 ha ditahun 2018, tahun 2019 luas panen jagung Kembali meningkat di angka 87 ha, peningkatan drastic kemabli terjadi di tahun 2020 hingga 2021 diangka 101 ha pada tahun 2020 dan 143 ha pada tahun 2021 dan di tahun terakhir di angka menurut 134 ha pada

2022. Luas panen jagung sendiri bisa di bilang naik turun untuk luas panennya menurut data BPP Pajangan.

Alih fungsi lahan akan membrikan dampak bagi ketahan pangan, maka dari itu harus segera dicarikan solusi untuk memecahkannya. Konversi lahan ini juga berdampak pada area pesawahan, rawa-rawa, dan kebun yang berada di dataran rendah, dimana hal ini dapat mempengaruhi produksi pertanian, seperti jagung, padi, karet, dan lain sebagainya. Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik mengambil judul **“Pengaruh alih fungsi lahan pertanian terhadap ketahanan pangan berdasarkan aspek ketersediaan pangan di Kapanewon Pajangan”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana situasi perubahan fungsi lahan pertanian di Kapanewon Pajangan dalam periode waktu tertentu?
2. Apa faktor-faktor yang berkontribusi pada keputusan perubahan fungsi lahan pertanian di daerah tersebut?
3. Bagaimana perubahan fungsi lahan pertanian memengaruhi produktivitas pertanian dan ketersediaan pangan di Kapanewon Pajangan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Menganalisis laju alih fungsi lahan pertanian di Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul
2. Menganalisis kondisi ketahanan pangan berdasarkan aspek ketersediaan pangan di Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
3. Menganalisis pengaruh alih fungsi lahan dan peningkatan jumlah penduduk berdasarkan aspek ketersediaan pangan di Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.

D. Kegunaan Penelitian

1. Dokumen ini bisa jadi sumber informasi penting untuk Pemerintah Daerah Pajangan dan Bantul, serta pemerintah pusat secara keseluruhan. Tujuannya adalah membantu mereka merancang kebijakan terkait perubahan fungsi lahan pertanian dan ketahanan pangan. Harapannya, hal ini dapat membantu memaksimalkan penggunaan lahan pertanian dan membuat kontrol perubahan fungsi lahan di Kabupaten Bantul lebih efektif.
2. Dokumen ini juga dapat menjadi sumber pengetahuan ilmiah bagi masyarakat umum dan sektor swasta atau dunia usaha. Fungsinya adalah memberikan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk memperluas pemahaman, referensi, dan bahan kajian tentang perubahan fungsi lahan pertanian serta ketahanan pangan